

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Bab keempat ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian yang merupakan suatu proses atau tata cara bagaimana sebuah permasalahan empiris sebagai fenomena sosial dapat diungkapkan maknanya melalui pola pikir yang ilmiah yang telah disepakati oleh kalangan akademisi. Metode penelitian tentang analisis implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia sebagai sebuah kebijakan publik ini, sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan kegiatan yang dapat diamati. Pendekatan ini dipilih berdasarkan pertimbangan, bahwa penelitian ini memerlukan data yang bersifat informasi kualitatif, sehingga dapat memahami substansi dari hal mengapa kebijakan KPP APEC ini lahir secara lebih mendalam dan utuh. Hal ini berbeda dengan pendekatan kuantitatif di mana informan dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk melakukan generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti dengan asumsi bahwa setiap konteks yang terkait dengan penelitian bersifat kritis sehingga masing-masing memberikan andil secara kontekstual terhadap data-data di lapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi; Departemen Luar Negeri dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Pemilihan lokasi ini dipilih secara sengaja mengingat Direktorat Jenderal Imigrasi

merupakan pelaksana teknis operasional implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, Departemen Luar Negeri dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) merupakan pihak-pihak yang berhubungan secara langsung atau pun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia. Informan dalam penelitian ini adalah unsur yang pernah, sedang terlibat dan atau memiliki pengetahuan berkaitan dengan implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, seperti: Direktorat Kerjasama Antar Kawasan Departemen Luar Negeri; Direktorat Doklan Visa dan Faskim Direktorat Jenderal Imigrasi; dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan dalam penelitian, data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen, pengamatan langsung, dan wawancara mendalam, ketiga langkah teknik pengumpulan data ini dengan sendirinya membentuk suatu model triangulasi, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data penelitian secara lengkap dengan melakukan kombinasi untuk metode yang memahami suatu fenomena. Data yang digunakan dalam penelitian ini menurut cara memperolehnya (sumber data) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

#### **1. Pengumpulan data sekunder**

Cara kerja yang dilakukan, pertama adalah penelusuran dokumen, di mana adanya pengumpulan berbagai keterangan dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik melalui penelusuran kepustakaan dan yang diperoleh dari laporan-laporan yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan KPP APEC, selanjutnya konsultasi dengan Direktur Kerjasama Antar Kawasan Departemen Luar Negeri, Direktur Luar Negeri KADIN, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Doklan Visa dan Faskim Direktorat Jenderal Imigrasi, tentang maksud dan diadakan penelitian,

serta mengali data-data sekunder tentang apa dan bagaimana implikasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia sebagai sebuah kebijakan publik.

## **2. Pengumpulan data primer**

Teknik pengumpulan data primer, terbagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu *pertama* melakukan pengamatan partisipasi (observasi atau survei lapangan), yaitu merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan melibatkan diri secara langsung terhadap objek penelitian, baik menyangkut objek, kejadian, proses, kebijakan yang dibuat dan direalisasikan. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya. Observasi bertujuan mengali sebanyak mungkin informasi tentang situasi dan kondisi di lapangan serta mengidentifikasi informan kunci terkait penelitian. Proses observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi-lokasi yang potensial memberikan informasi penting, terkait penelitian ini. Cara yang *kedua*, yaitu melakukan wawancara mendalam (*dept interview*) terhadap para informan kunci (*key informant*) karena pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, data primer yang akan digali dalam teknik wawancara mendalam ini adalah bagaimana implementasi kebijakan KPP APEC yang dibuat dan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memfasilitasi mobilitas pelaku bisnis Ekonomi APEC. Wawancara dilakukan melalui pertanyaan tak terstruktur, dalam hal ini informan tidak ditempatkan sebagai objek penelitian, akan tetapi sebagai subjek penelitian, di mana informan diberikan kebebasan untuk menceritakan apa saja tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban oleh peneliti. Akan tetapi, diupayakan untuk tidak menyimpang dari pedoman penelitian yang ada, jumlah informan adalah beberapa orang yang mewakili instansi pengambil kebijakan pada Departemen Luar Negeri; Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk informan kunci, adalah:

1. Anak Agung Arif, Staf Kerja sama regional dan multiregional, Direktorat Kerja sama antar Kawasan Asia dan Kawasan Pasifik, Departemen Luar Negeri.

2. Ferdy Pieye, Kasi Kerja sama regional dan multiregional, Direktorat Kerja sama antar Kawasan Asia dan Kawasan Pasifik, Departemen Luar Negeri.
3. Ibnu Hadi, Direktur Kerja sama antar Kawasan Asia dan Kawasan Pasifik, Departemen Luar Negeri.
4. Hariadi Saptadji, Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
5. Witjaksana Soeganda, Direktur Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
6. Machdin M. Ismail, Kepala Hubungan Bilateral, Direktorat Hubungan Internasional, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
7. Yuanita Sitorus, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Kerja Sama Luar Negeri dan Lintas Batas, Direktorat Jenderal Imigrasi.
8. Djoko Subagyo, Kepala Sub Direktorat Kerja sama antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Berikut ini bagan teknik pengumpulan data beserta sumber data tersebut diperoleh:

**Tabel.5.Teknik Pengumpulan Data beserta Sumber Data tersebut Diperoleh**

No.	Nama Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1.	Regulator Kebijakan: Proses regulasi kebijakan Situasi regulasi kebijakan	Wawancara dan observasi lapangan	Departemen Luar Negeri; KADIN; Direktorat Jenderal Imigrasi
2.	Operator Kebijakan: a. Aspek sumber daya manusia b. Aspek pra sarana c. Aspek sarana d. Aspek operasional	Wawancara dan observasi lapangan	Direktorat Jenderal Imigrasi
3.	Pengguna Kebijakan: a. Pelaku bisnis b. Pejabat Eselon I atau	Wawancara dan observasi lapangan	Departemen Luar Negeri; KADIN; Direktorat Jenderal

	setingkat Negara c. Petugas Menangani APEC	Kementerian Yang KPP	Imigrasi
--	--	----------------------------	----------

#### D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka, analisis yang akan dipergunakan adalah analisis induktif, yaitu dengan mengali fakta-fakta pelaksanaan atau implementasi kebijakan KPP APEC sebagai sebuah kebijakan publik untuk memfasilitasi mobilitas pelaku bisnis Ekonomi APEC dalam pembentukan sebuah model penyelesaian permasalahan tingginya pergerakan pelaku usaha antar Ekonomi APEC, kemudian dianalisis dengan metode analisis GAP, yaitu analisis perbedaan antara persepsi harapan kebijakan KPP APEC yang dibuat dengan realisasi kebijakan saat ini. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu *pertama* mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber baik yang didapat dari penelusuran dokumen, pengamatan, maupun wawancara. *Kedua*, mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi berupa rangkuman inti dari ringkasan terhadap substansi berbagai dokumen, salinan data lapangan, maupun transkrip wawancara informan. *Ketiga*, membuat satuan-satuan dari kategorisasi, kategorisasi didasarkan atas dasar pikiran, intuisi, pendapat dan kriteria tertentu terhadap data dan informasi yang diperoleh. Pada proses ini peneliti membuat ringkasan mengenai keterangan atau pendapat kunci informan terkait aspek-aspek penelitian tersebut. *Keempat*, melakukan koding, yakni melakukan penandaan secara konsisten seluruh informan berdasarkan kasus dan urutan wawancara, dengan demikian peneliti dapat melacak informasi tertentu walaupun informasi tersebut telah didistribusikan ke dalam kelompok-kelompok pendapat yang berbeda pada aspek penelitian. *Kelima*, melakukan pemeriksaan keabsahan data, pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah data-data diabstraksikan di susun dalam kategori-kategori dan telah dilakukan penandaan sepenuhnya dengan konsisten, peneliti juga melakukan triangulasi data

primer dengan data-data dokumen lainnya. *Keenam*, melakukan analisis GAP terhadap data-data yang memang harus dinilai dari hasil implementasinya, terutama pada komponen operator dan pengguna kebijakan KPP APEC. Setelah tahapan-tahapan di atas, peneliti melakukan analisis data dan penafsiran data, kemudian mengolahnya ke dalam pemaparan yang kritis dengan sifat deskripsi analitik. Deskripsi ini memuat sejumlah narasi mengenai proses, temuan, dan kecenderungan yang menonjol dalam hasil penelitian. Analisis akan membuat sejumlah narasi mengenai berbagai temuan yang berkaitan dengan kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, berbagai narasi mengenai temuan tersebut, akan diuraikan sebagai hasil pembahasan, kesimpulan dan saran.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penelitian ini, yaitu peneliti menyadari bahwa melakukan penelitian khususnya pada wawancara terhadap para penentu kebijakan di Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), tidaklah merupakan hal yang mudah, akses kepada pihak-pihak tersebut sulit dilakukan karena untuk bertemu dengan pihak-pihak tersebut membutuhkan waktu khusus, di mana ketika kompleksitas tugas dan pekerjaan mereka dan sempitnya waktu. Selain itu, keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti mengalami kekurangan data yang lengkap mengenai implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia sebagai sebuah kebijakan publik, menjadikan peneliti masih menggunakan hasil studi literatur.

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia sebagai sebuah